

tetap memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa penyidikan yang dimiliki oleh OJK adalah konstitusional selama koordinasi terpenuhi. Oleh karena itu untuk pengaturan kewajiban berkoordinasi serta mekanisme penyidikan oleh Penyidik OJK tidak hanya tunduk berdasarkan pada Peraturan OJK, Keputusan Dewan Komisiner, maupun dalam bentuk Nota Kesepahaman, akan tetapi perlu dicantumkan dalam UU OJK.

- 4.2.2 Aparat penegak hukum baik Penyidik Polri maupun Penyidik OJK dengan bantuan serta dukungan oleh Pemerintah perlu mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada praktik penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam penanganan perkara dengan membuat peraturan hukum yang secara nyata tegas dan jelas tertulis (*lex cripta*) mengenai koordinasi antara Penyidik Polri dan Penyidik OJK sehingga banyaknya perkara yang terjadi akan lebih optimal ditangani melalui koordinasi yang kuat dan efektif, walaupun jumlah sumber daya manusia Penyidik OJK tidak sebanding dengan perkara yang ada terutama perkara yang terjadi di daerah yang mana di setiap daerah tidak semuanya terdapat kantor OJK serta Penyidik OJK hanya berada di kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Cet. I, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), Jakarta, 2014.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi Total, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

### B. Jurnal

Ahmad Solahudin, 'Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan', *Jurnal IUS*, Vol. III, No. 7, April 2015.

Andang Setyobudi, 'Peran serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)', *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2007.

Bintang Puwan Permata, 'Persamaan dan Perbedaan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan Financial Services Authority Inggris', *Privat Law*, edisi 2 Juli Oktober 2013.

Difa Dinni Asfari, 'Otoritas Jasa Keuangan', *Jurnal Bina Ekonomi Majalah Ilmiah*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2014.

Inosentius Samsul, 'Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)', *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 4, No. 2, November 2013.

Muchda, Metia Winati, Maryati Bachtiar dan Dasrol, 'Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan', *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22, No. 2, Juni 2014.

Nazia Tunisa, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia', *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Wahyu Wiriadinata, 'Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44*, No. 1, Januari-Maret.

Zaidatul Amina, 'Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari Pengalaman di Negara Lain', *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. I, No. 1, 2012.

### **C. Skripsi**

Fernando Hamonangan, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

### **D. Disertasi**

Hadi Utomo, *Kewenangan Penyidik pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

**E. Artikel dan Internet**

BPS-Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2015*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2015.

Estu Suryowati, Banyak BPT Ditutup karena 'Fraud', OJK Akui Kurang Pengawasan, *Kompas.com*, 14 November 2016, diunduh melalui <https://money.kompas.com/read/2016/11/14/124640326/banyak.bpr.di.tutup.karena.fraud.ojk.akui.kurang.pengawasan>, diunduh pada 18 Januari 2020, 16.45 WIB.

International Monetary Fund, Japan: IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulations – Detailed Assessment and Implementation, *IMF Country Report No. 12/230*, August 2012.

Mahkamah Konstitusi, '*Risalah Sidang tertanggal 18 Februari 2019 dalam Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 Perihal pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.'

Mahkamah Konstitusi, '*Risalah Sidang tertanggal 28 Februari 2019 dalam Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 Perihal pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.'

Mahkamah Konstitusi, '*Risalah Sidang tertanggal 7 Februari 2019 dalam Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 Perihal pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*', Jakarta, 2019.

Nina, Dwiantika, Ini 50 Konglomerasi Keuangan yang Diawasi OJK, *Kompas.com*, 3 Juli 2015, diunduh melalui <https://money.kompas.com/read/2015/07/03/034600026/Ini.50.Konglomerasi.Keuangan.yang.Diawasi.OJK>, diunduh pada 7 Desember 2019, 22:31 WIB.

Nurhaida, Reformasi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan melalui Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, [http://www.iaitbjakarta.com/files/makalah\\_Ibu\\_Nurhaida\\_OJK.pdf](http://www.iaitbjakarta.com/files/makalah_Ibu_Nurhaida_OJK.pdf).

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandarlampung, 2009.

- Terry Hutchinson, 'Developing legal research skills : expanding the paradigm', *Melbourne University Law Review*, Vol 32, 2008, h.1068. <https://eprints.qut.edu.au/20330/1/c20330.pdf> > dikutip dari Dennis Pearce, Enid Campbell dan Don Harding, *Australian Law Schools: A Discipline Assessment for the Commonwealth Tertiary Education Commission*, Australian Government Publication Services, Canberra, 1987, h.8-307.
- Tim Panitia Antar Departemen RUU tentang OJK, '*Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*', Jakarta, 2010.
- Tito Sulistio, *Mencari Ekonomi Pro Pasar: Catatan Tentang Pasar Modal, Privatisasi dan Konglomerasi Lokal*, The Investor, Jakarta, 2004.
- Tricia Howse, England, 'Part I: Presentation of National Systems of Investigation, Prosecution, Evidence, and Procedural Safeguards', diedit oleh Katalin Liget dalam *Toward a Prosecutor for the European Union*, Vol. 1:A Comparative Analysis, Hart Publishing, Ltd, Oxford, 2013, Part I (Chapt. 4 : England).
- World Bank, *Indonesia Economic Quarterly: Staying the Course*, The World Bank, March 2017.